BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden Republik Indonesia. Dalam mengemban tugasnya Polri di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yang disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan. Organisasi pada tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI), sedangkan organisasi pada tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). (UU No. 2 Tahun 2002)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang berlandaskan Tribrata dan Catur Prasetya mempunyai tugas pokok yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Selain itu Polri juga bertugas sebagai penegak hukum.Untuk menjadi seorang anggota Polri para pendaftar harus menjalani beberapa test/ seleksi yang diadakan oleh panitia pendaftaran.Para peserta juga diwajibkan menuliskan pernyataan bahwasanya apabila diterima sebagai anggota Polisi harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara garis besar tugas anggota Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Polri adalah berdasarkan komando atau perintah.Setiap perintah harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan loyalitas.Selain tugas dan tanggung jawab seorang anggota Polri yang rutinitas ternyata adapula tugas yang insidentil.Tugas dan tanggung jawab yang insidentil yaitu apabila ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang belum diprediksi terjadi dan memerlukan bantuan atau penanganan dari pihak Kepolisian sehingga harus siap ditugaskan tempat kejadian.

Adapun beberapa contoh peristiwa insidentil yang perlu penanganan dan atau bantuan dari pihak Kepolisian yaitu peristiwa konflik pada daerah Poso Sulawasi Tengah, kemudian pemberontakan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di daerah Nangroe Aceh Darusalam (NAD), pada misi perdamaian dunia (PBB) di Darfour Sudan, selanjutnya daeran-daerah tersebut dianggap daerah konflik sosial. (http://www.jpnn.com/)

Daerah konflik sosial merupakan daerah yang mengalami peristiwa atau kejadian seperti pertikaian, perang, perselisihan dan peristiwa yang dapat mengancam Stabilitas Nasional seperti keamanan dan kenyamanan serta jiwa manusia (konflik sosial). Konflik sosial menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 pasal 1 yang dimaksud dengan Konflik sosial, yang selanjutnya disebut dengan konflik, adalah perseteruan

dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu Stabilitas Nasional dan menghambat pembangunan nasional. Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 juga disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat POLRI, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tidak semua anggota Polri yang ditugaskan ke daerah konflik sosial menjalankan tugasnya dengan semangat, akan tetapi berdasarkan perintah atau komando dari pimpinan mau tidak mau setiap anggota Polri harus siap dan sedia menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Menurut salah satu anggota Polri yang pernah bertugas pada daerah konflik sosial dari hasil wawancara awal menyatakan:

> *“ waktu itu saya sempat bertengkar karena masalah sepele tapi karna terbawa situasi di Poso, jadi saya sangat emosi sampai-sampai saya memukulnya” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 April 2013 pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R, mengaku bahwa setelah kembalinya dari daerah konflik tempat ia bertugas, subjek R sangat mudah tersinggung, mudah emosi dan sering marah-marah dengan permasalahan yang bisa dianggap sepele yang terkadang menyebabkan

perkelahian hingga terjadi pemukulan.

Selain itu subjek H (45 tahun) seorang anggota Polri menjelaskan keadaannya setelah melaksanakan tugasnya di beberapa daerah konflik merasa biasa-biasa saja.

> *"karena pergi ke daerah konflik itu adalah tugas negara ya... menurut saya biasa-biasa saja buktinya saya sekarang biasa-biasa saja, ya namanya tugas kita harus lapang dada jalaninya... "(wawancara dilakukan pada Selasa, 23 September 2014 pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara awal terhadap subjek H, diketahui bahwa H pernah melaksanakan tugasnya di beberapa daerah konflik. Hal tersebut tidak merubah perilaku H dan sekarang H masih dapat menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai anggota Polri.

Pada subjek W mengatakan:

> *"Yang dirasain setelah balik dari daerah konflik yaa lepas beban konflik terus kalau ditanya siap atau gaknya kalau ditugasin lagi ya siap ga siap, abisnya berat ninggalin istri sama keluarga"*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap subjek W, diketahui bahwa subjek W merasa terlepas bebannya ketika pulang dari tugas ke daerah konflik sosial. W menyatakan siap tidak siap jika ditugaskan kembali ke daerah konflik sosial dengan alasan merasa berat meninggalkan istri dan keluarga W.

Terlihat dari subjek H dan W bahwa keduanya merasa harus siap apabila ditugaskan di daerah konflik sosial. Pada W menyatakan bahwa kembalinya dari daerah konflik merasa terlepas dari beban tugasnya, ia juga mengatakan bahwa apabila ditugaskan kembali ke daerah konflik

menyatakan bahwa ia siap tidak siap dengan alasan berat meninggalkan istri dan keluarga.

Setiap pekerjaan pasti mempunyai resiko begitu pula anggota Polri yang bertugas di daerah konflik seperti yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah kerap menjadi korban. Aksi baku tembak di pegunungan Desa Kalora, Poso, Sulawesi Tengah menyebabkan tiga anggota Brimob Polri meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka parah karena tertembak di bagian kepala, perut serta paha anggota Brimob (Bal, 2012). Selain itu Selain itu,Sepanjang tahun 2012, *Indonesia Police Watch (IPW)* mencatat ada 29 polisi tewas dan 14 lainnya luka - luka saat menjalankan tugas menjaga keamanan masyarakat di ruang terbuka maupun tertutup. (Priyambodo, 2012).

Dengan resiko yang diterima anggota Polri dalam bertugas di daerah konflik sosial terkadang memberikan dampak psikologis berupa mudah marah, mudah tersinggung dan menutup diri..Anggota Polri membutuhkan penyesuaian diri setelah kembali dari bertugas pada daerah konflik tersebut. Menurut Schneiders (dalam Hurlock, 1990) mengatakan penyesuaian sosialmerupakan proses mental dan tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri dengan keinginan yang berasal dari dalam diri sendiri yang dapat diterima oleh lingkungannya.

Hurlock (1991) mendefinisikan penyesuaian sosial sebagai kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya. Artinya anggota Polri

yang pernah berdinas di daerah konflik sosial dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan nyaman terhadap lingkungan sosialnya.

Menurut Anita (2011), pada penelitiannya yang berjudul "Penyesuaian Dusun jangka Panjang Ditinjau dari Resiliensi Komunitas Pasca Gempa" menyatakan bahwa bencana gempa di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 berdampak fisik, psikis dan lingkungan. Bukan hanya kerusakan secara fisik, namun banyak keluarga yang kehilangan orang-orang yang dicintai dan rumah yang sudah cukup lama mereka tinggali merupakan tekanan psikologis bagi warga yang dapat menyebabkan munculnya PTSD (*Posttraumatic Stress Disorder*). Dari penelitian ini dimensi yang paling signifikan dari dampak psikologisnya antara lain depresi, somatisasi, dan kecemasan. Dari dampak-dampak yang terjadi akibat bencana tersebut perlu adanya adaptasi kembali dan penyesuaian sosial kembali bagi para korban bencana gempa tersebut. Artinya bila dikaitkan dengan situasi konflik sosial yang dialami anggota Polri seperti korban bencana alam, mereka (anggota Polri) juga dituntut untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang baru.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti mencoba untuk meneliti beberapa subjek yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang pernah ditugaskan ke daerah konflik sosial.Peneliti hendak memperoleh gambaran nyata dari penyesuaian sosial seorang anggota Polri yang pernah bertugas di daerah konflik sosial. Penelitian itu akan penulis realisasikan dengan membuat tulisan yang

berjudul **"Gambaran Penyesuaian Sosial Anggota Polri yang Pernah Bertugas di Daerah Konflik Sosial".**

B. Identifikasi Masalah

Polri dalam tugasnya mengemban peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan di masyarakat.Setiap anggota polri harus siap sedia menjalankan tugasnya dengan jiwa loyalitas sebagai abdi Negara.Dalam tugasnya Polri tidak boleh pandang bulu atau memilih tugas dan tanggung jawabnya karena pada dasarnya tugas Polri berdasarkan komando atau perintah.Salah satu tugas anggota Polri adalah harus siap ditempatkan di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, meskipun wilayah tersebut sedang mengalami konflik sosial.

Walaupun dalam situasi, daerah konflik setiap anggota Polri yang ditugaskan pada daerah tersebut harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Dalam situasi wilayah yang mengalami konflik sosial, menimbulkan ketidaknyamanan bagi anggota Polri yang ditugaskan pada daerah tersebut, dan terkadang anggota Polri mengalami masalah psikologis, misalnya mudah marah, mudah tersinggung dan menutup diri setelah anggota Polri tersebut kembali dari daerah konflik sosial, sehingga perlu adanya penyesuaian sosial kembali setelah anggota Polri tersebut kembali dari daerah konflik sosial, untuk melanjutkan aktivitasnya sebagaimana mestinya sebelum anggota Polri tersebut berangkat berdinas ke daerah konflik.

Anggota Polri setelah melaksanakan tugasnya di daerah konflik sosial seharusnya dapat melakukan kembali aktivitas sebagaimana sebelum anggota Polri tersebut berangkat bertugas ke daerah konflik sosial, misalnya dalam lingkungan pekerjaan, seorang anggota Polri harus dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai *job description* dengan perasaan yang nyaman tidak seperti berada di daerah konflik sosial, dalam lingkungan sosialnya seperti keluarga, teman sebaya dan orang dewasa ia harus dapat merasa nyaman dan dapat menyesuaikan keadaan.

Pada dasarnya anggota Polri yang pernah ditugaskan didaerah konflik sosial dituntut untuk dapat menyesuaiakan diri setelah anggota Polri tersebut kembali dari daerah konflik sosial. Anggota Polri yang berhasil melakukan penyesuaian sosial yang baik akan mengembangkan sikap sosial yang menyenangkan. Lingkungan sosial akan mempunyai nilai positif terhadap anggota Polri yang pernah melaksanakan tugas di daerah yang mengalami konflik sosial yang menyebabkan anggota Polri tersebut akan menilai dirinya cukup berharga dan merasa percaya diri untuk melakukan penyesuaian sosial dengan lingkungannya. Namum pada kenyataannya beberapa anggota Polri yang mengalami ketidaknyamanan setelah kembali dari daerah konflik sosial misalnya penuh curiga terhadap lingkungan sosialnya, mudah terpancing emosi serta ada beberapa yang meninggalkan bekas luka pada bagian tubuh anggota Polri yang kemudian lingkungan sosialnya menilai secara negatif terhadap anggota Polri tersebut sehingga membuat hambatan dalam melakukan penyesuaian

dengan lingkungan sosialnya. Dengan ketidaknyamanan tersebut membuat anggota polri mendapat pandangan negatif dari lingkungan sosialnya yang menyebabkan anggota Polri tersebut merasa kurang berharga, kurang percaya diri, dan kurang baik di hadapan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui gambaran penyesuaian sosial anggota Polri yang pernah berdinas di daerah konflik.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penyesuaian sosial anggota polisi yang pernah bertugas pada daerah yang mengalami konflik sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

   Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas tentang penyesuaian sosial khususnya pada bidang ilmu Psikologi Sosial dan Psikologi Klinis.

2. Secara Praktis :

   Untuk dapat memberikan wawasan/gambaran kepada masyarakat tumumnya dan kepada anggota Polri khususnya mengenai tugas di daerah konflik.

E. Kerangka Berpikir

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan instansi pemerintah yang bertugas pokok melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Tugas-tugas Polri diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Dengan didasari tugas dan tanggung jawab tersebut Polri mempunyai peranan penting dalam menjaga Stabilitas Nasional.

Salah satu tugasnya dalam menjaga Stabilitas Nasional adalah menjaga Kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat). Dengan kehadiran Polri diharapkan masyarakat merasa aman, tentram dan damai sehingga gangguan kamtibmas itu menjadi berkurang.

Indonesia dikenal dengan beranekaragaman suku, agama, ras dan budaya yang merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia.Kondisi ini, di satu sisi dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketidakseimbangan pembangunan, ketidakadilan, kesenjangan sosial dan ekonomi serta kehidupan politik yang tidak terkendali. Hal ini dapat menjadi sebuah pemicu timbulnya konflik sosial.

Apabila terjadi hal demikian (konflik sosial), maka instansi Polri mempunyai andil tugas dalam menjaga Stabilitas Nasional.Adapun beberapa daerah yang pernah mengalami konflik sosial salah satunya adalah konflik sosial di Poso, Sulawesi Tengah.Kemudian beberapa

jumlah personel Polri selanjutnya dikerahkan Ke daerah tersebut untuk menjaga Stabilitas Nasional.Beberapa contoh daerah yang mengalami konflik sosial diantaranya peristiwa di Poso, Sulawesi Tengah, Papua, Nangroe Aceh Darusalam, dan lain-lain.

Sebagai abdi negara dalam menjalankan tugas harus dengan berlap-ang dada dan tidak bisa menolak perintah yang diberikan.Mereka harus siap sedia menjalankan apapun perintah yang diberikan dengan mengorbankan meninggalkan untuk sementara hak-hak untuk menjalankan kewajibannya sebagai abdi negara.

Dengan situasi daerah konflik sosial yang mencekam, menakutkan dan rasa kewaspadaan anak bahaya tinggi berdampak psikologis terhadap anggota Polri yang bertugas pada daerah tersebut misalnya mudah marah, mudah tersinggung, menutup diri. Pengalaman yang *stressfull* di daerah konflik tersebut menuntut adanya kemampuan penyesuaian sosial adalah keberhasilan penyesuaian diri seseorang dalam memainkan perannya di lingkungan sosial yang tercermin dalam bentuk perilaku-perilaku sebagai suatu respon terhadap tuntutan-tuntutan yang berasal dari lingkungan sosial. (Hurlock, 1990). Penyesuaian sosial anggota Polri yang pernah ditugaskan pada daerah konflik memiliki beberapa aspek antara lain, penampilan nyata, penyesuaian diri berbagai kelompok, sikap sosial, kepuasan pribadi.

Seorang anggota Polri yang mempunyai penyesuaian sosial yang positif ditandai memenuhi beberapa aspek yaitu *Pertama*, aspek

penampilan nyata (*overt performance)* yang meliputi beberapa indikator perilaku seperti aktualisasi diri, keterampilan menjalin hubungan antar manusia dan kesedian untuk terbuka pada orang lain. Dengan kata lain anggota Polri yang memiliki penyesuaian sosial yang positif mempunyai kemampuan menjadi diri sendiri, dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, dapat berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan sosialnya, mampu berorganisasi di lingkungan sosialnya serta memiliki sifat terbuka dan bersedia menerima informasi dari lingkungan sosialnya. Sebaliknya anggota polri yang tidak dapat menyesuaikan diri atau memiliki penyesuaian sosial yang negatif dengan aspek penampilan nyata *(overt performance)* ditandai dengan prilaku yang tidak dapat menjadi diri sendiri, tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, tidak mampu untuk menjalin komunikasi dengan lingkungan sosialnya, kurang mampu dalam berorganisasi serta menjadi pribadi yang tertutup.

Kedua, aspek penyesuaian berbagai kelompok yang meliputi beberapa indikator perilaku seperti kerja sama dengan kelompok, tanggung jawab, setia kawan. Dilihat dari aspek ini, anggota Polri yang mempunyai penyesuaian sosial positif ditandai dengan prilaku mampu bekerja secara kelompok dengan orang lain, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, mampu saling berbagi dalam kebaikan pada lingkungan sosialnya yang baru. Jika anggota Polri tersebut memiliki penyesuaian sosial yang negatif pada aspek kedua ini, ditandai oleh perilaku ketidakmampuan anggota Polri untuk bekerja sama dengan orang

lain, kurang bertanggung jawab, adanya sikap egois dan hanya mementingkan diri sendiri.

Ketiga, aspek sikap sosial yang meliputi beberapa indikator perilaku seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat, berempati serta dapat menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jika dilihat dari aspek ini, anggota Polri yang memiliki penyesuaian yang positif ditandai dengan menunjukan sikap empati, ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan sosialnya, mampu menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Apabila anggota Polri memiliki penyesuaian sosial yang negatif, perilaku yang muncul seperti apatis, tidak dapat menerima pendapat orang lain.

Keempat, aspek kepuasan pribadi meliputi beberapa indikator seperti kepercayaan diri, disiplin diri dan adanya rasa puas dan bahagia dalam aktivitas kelompoknya. Dengan kata lain penyesuaian yang positif ditandai dengan adanya mampu percaya diri, mengikuti aturan yang ada dan memiliki rasa puas/bahagia terhadap apa yang dimilikinya. Sebaliknya penyesuaian yang negatif ditandai dengan sikap yang kurang percaya diri, melanggar peraturan dan tidak pernah puas/bahagia dengan apa yang didapatnya.

Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menggambarkannya kedalam kerangka berpikir seperti pada gambar 1.1 sebagai berikut :

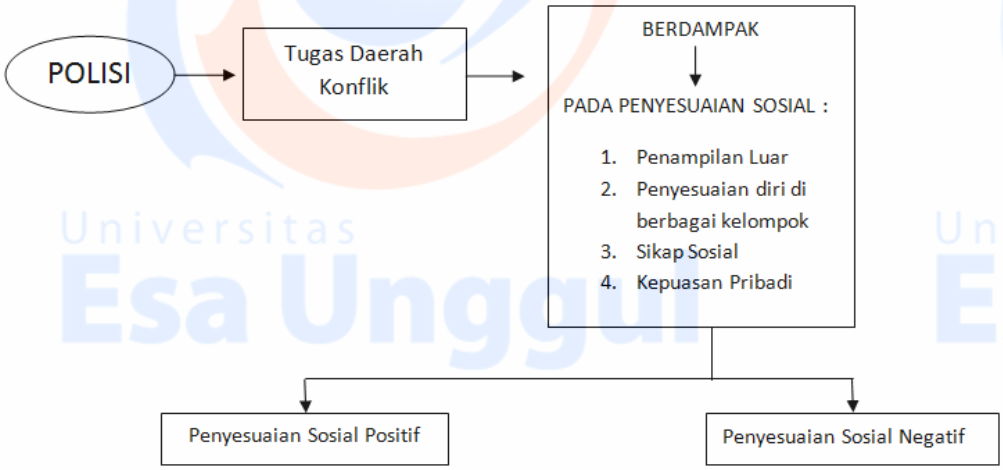

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir